

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen, Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*, UB Press, Malang, 2011.
- Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar*, Daya Widya, Jakarta, 1999.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2000.
- Soerjono Soekanto, *Efektifitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Ramadja Karya, Bandung, 1988.
- _____, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Susan Stewart, *Conflict Resolution: A Foundation Guide*, Waterside Press, Winchester, 1998.
- Cristopher W. Moore *The Meditation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict* (edisi kedua), Jossey-Bass Publishers, San Fransisco, 1996.
- Rachmad Syafa'at, *Mediasi dan Advokasi Konsep dan Implementasinya*, Agritek YPN Malang kerjasama dengan SOFA Press, Malang, 2006.
- Soepomo, *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*, Paramita, Jakarta, 1991.
- Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa (seri hukum bisnis)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, Bina Cipta, Bandung, 1992.
- Yusuf Sofie, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Teori dan Praktek Penegakan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2001.

Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Yarsif Watampone, Jakarta, 1998.

JURNAL

Badan Pusat Statistik Kota Tasikmalaya, *Produk Domestik Regional Bruto Kota Tasikmalaya Menurut Lapangan Usaha 2011-2015*, 2015.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Pemerintah Kota Medan, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Malang, dan Kota Makassar.

Keputusan Presiden No. 108 Tahun 2004 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Pemerintah Kota Kupang, Kota Samarinda, Kota Sukabumi, Kota Bogor, Kota Kediri, Kota Mataram, Kota Palangkaraya, Kabupaten Kupang, Kabupaten Belitung, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Serang, Kabupaten Ogan Komering Ulu, dan Kabupaten Jeneponto.

Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2005 membentuk tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Pemerintah Kota Padang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Tangerang.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Kabupaten Mappi, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Probolinggo, Kota Lubuklinggau, dan Kota Tasikmalaya.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep/12/2001 Tanggal 10 Desember 2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK.

DATA ELEKTRONIK

etd.repository.ugm.ac.id/downloadfile/76566/.../D3-2014-320418-introduction.pdf

<http://www.wartapriangan.com/puluhan-massa-geruduk-kantor-leasing-tasikmalaya/25776/>

http://eprints.undip.ac.id/46032/2/Dewi_Muthi_Fauziah_21020111110140_Bab_I.pdf

<http://www.pengertianpakar.com/2014/12/pengertian-efisiensi-efektivitas-dan.html>

<http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-teknik-purposive-sampling-menurut-para-ahli/>

<https://fandisatria966.blogspot.co.id/2017/01/sejarah-hukum-lembaga-komisi-penyiaran.html>

<https://wisuda.unud.ac.id/pdf/1103005053-2-BAB%20I.pdf>

SUMBER LAIN

Deperindag, *Pedoman Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*, 2002.

BPSK Kota tasikmalaya, *Data Penyelesaian Sengketa konsumen di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK Kota Tasikmalaya)*, 2015.

BPSK Kota tasikmalaya, *Data Penyelesaian Sengketa konsumen di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK Kota Tasikmalaya)*, 2016.

BPSK Kota tasikmalaya, *Rekapitulasi Laporan Bulanan Penangan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Tasikmalaya, 2014.*

